

## ANALISIS KINERJA PENDAPATAN DAERAH DAN KEMANDIRIAN DAERAH PADA MASA OTONOMI DAERAH

Sri Isnowati<sup>1</sup>; Gregorius N Masdjojo<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang<sup>1;2</sup>  
Email : isnowati@edu.unisbank.ac.id<sup>1</sup>; masdjojo@edu.unisbank.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji kinerja pendapatan dan kemandirian daerah di masa otonomi daerah di Kabupaten Brebes. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif dan dicirikan oleh sifat deskriptifnya. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder. Teknik analisis data yang dilakukan adalah Perbandingan Derajat Desentralisasi, Perbandingan Efektifitas, Perbandingan Kemandirian Daerah dan Perbandingan Pertumbuhan. Berdasarkan atas analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa derajat desentralisasi di Kabupaten Brebes masih berada pada derajat desentralisasi rendah, Tingkat Kemandirian di Kabupaten Brebes adalah rendah, karena masih dibawah 20 %, Perbandingan Efektifitas adalah efektif yang berarti target Pendapatan Asli Daerah sering tidak mencapai 100%. Sementara itu hasil Perbandingan Pertumbuhan menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah relatif kecil.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah; Perbandingan Derajat Desentralisasi; Perbandingan Kemandirian; Perbandingan Efektifitas, Perbandingan Pertumbuhan

### ABSTRACT

*This study seeks to investigate regional income performance and independence during the regional autonomy period in Brebes Regency. The employed research methodology is quantitative descriptive research. The dataset employed in this investigation consists of secondary data. The analytical methods applied include the Degree of Decentralization Ratio, the Effectiveness Ratio, the Regional Independence Ratio, and the Growth Ratio. Based on the analysis carried out, the results showed that the degree of decentralization in Brebes Regency is still at a low degree of decentralization, the level of the Independence Ratio in Brebes Regency is low, because it is still below 20%, the Effectiveness Ratio is effective, which means that the Regional Original Income target often does not reach 100% . Meanwhile, the results of the Growth Ratio show that growth in regional income and original regional income is relatively small.*

Keywords : *Locally-Generated Revenue; Decentralization Degree Ratio; Independence Ratio; Effectiveness Ratio; Growth Ratio*

### PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia terjadi perubahan yang cukup besar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaiki dalam Undang-Undang 32 tahun 2004, yang selanjutnya disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Ini

merupakan tonggak perubahan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, karena diberlakukannya otonomi Daerah.

Dengan implementasi otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan mandat untuk mengawasi sumber daya di bawah kepemilikannya sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan kapasitas dari masing-masing daerah. Hal ini bermakna terjadinya pengeloaan daerah yang semula tersentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan lebih dalam mengelola sumber daya selanjutnya membuat laporan pertanggungjawaban kepada rakyat.

Dengan adanya desentralisasi memberikan konsekwensi bahwa terjadi pelimpahan tanggung jawab, kekuasaan, serta pengelolaan sumber daya yang awalnya dilaksanakan pemerintah pusat selanjutnya dilaksanakan pemerintah daerah. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa sebagai peengalihan tanggung jawab dalam mengelola anggaran baik secara administrasi maupun penggunaan dan pemanfaatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Adi & Ekaristi, 2009) Sementara itu (Khusaini, 2019) menjelaskan bahwa terjadinya desentralisasi terjadi pengalihan tanggung jawab dan wewenang yang pada awalnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat selanjutnya dilimpahkan ke pemerintah daerah.

Tuntutan terlaksanya pengelolaan pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan syarat awal dari reformasi pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka merealisasikan pemerintahan yang baik, maka disyaratkan adanya kelembagaan serta manajemen publik yang lebih baik. Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah berperan penting dalam perubahan manajemen sektor publik (Mardiasmo, 2009).Asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah ternyata memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembangunan di daerah.

Setelah era otonomi daerah, pemerintah daerah dipaksa untuk berupaya menaikkan penerimaan daerah guna pemenuhan kebutuhan keuangan daerah. Pembelanjaan yang dilaksanakan daerah sangat tergantung pada penerimaan. Apabila penerimaan daerah mengalami kenaikan, maka akan berdampak pada kenaikan dana yang dimiliki pemerintah daerah. Ketika hal ini terjadi, maka kemandirian akan terjadi peningkatan. Pemerintah daerah dipaksa lebih intensif untuk dapat mencari lebih dalam potensi penerimaan daerah. Menurut (Siregar, 2023) (Sulaeman & Silvia, 2019)

terjadinya peningkatan pertumbuhan penerimaan daerah akan menimbulkan kenaikan pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah faktor kinerja keuangan merupakan elemen yang dominan sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih. Dengan melihat pengukuran kinerja akan dapat diukur pelaksanaan atas pelaksanaan perencanaan pemerintah (Saraswat & Rion, 2019). Dengan memanfaatkan teknik pengukuran, kinerja keuangan berfungsi sebagai alat penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi daerah. Pengawasan laporan keuangan memungkinkan untuk analisis secara mendalam, memfasilitasi penilaian dan peningkatan kinerja keuangan dalam rangka pengawasan kinerja pemerintah.

Setelah dilakukan otonomi daerah selama dua puluh lima tahun ternyata masih banyak daerah yang kinerja keuangan pemerintah daerah pada saat ini belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari banyak daerah-daerah yang mengharapkan bantuan keuangan bersumber dari pemerintah pusat, belum mampu memberdayakan dan meningkatkan sumber penerimaan yang berasal dari daerah (Putry & Badrudin, 2017). Penelitian dari (Noviriani & Febrianty, 2017) menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pendapatan daerah menyebabkan semakin bertambah belanja daerah.

Ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat merupakan satu masalah pokok dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Hal ini disebabkan proporsi transfer dari pusat masih mendominasi penerimaan daerah. Hal ini didukung penelitian dari (Purwanti & Noviyanti, 2022), (Harahap, 2020), (Septa Soraida, 2022) (Marliani, 2022)

Berdasarkan Tabel 1, dapat dicermati bahwa persoalan keuangan daerah yang dialami Kabupaten Brebes diantaranya adalah ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Brebes pada dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat masih dominan, selama periode waktu 2019 sampai dengan 2022. Dari data dapat dilihat bahwa besarnya dana transfer selalu mengalami peningkatan dalam nilai nominal. Dilihat dari proporsi dapat diketahui bahwa proporsi dana transfer mengalami peningkatan, pada tahun 2019 proporsi dana transfer sebesar 61 persen dan pada tahun 2022 besarnya dana transfer terhadap PAD sebesar 77 persen. Sementara itu perkembangan Pendapatan asli Daerah (PAD) tidak mengalami perkembangan yang signifikan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah atau sering dikenal kapasitas daerah sering digunakan sebagai salah tolak ukur yang dapat dimanfaatkan dalam menilai kemampuan daerah dalam pelaksanaan menjalankan otonomi daerah (Halim, 2012). Kinerja keuangan pemerintah daerah menyajikan penilaian atas terlaksananya inisiatif dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat terpantau dari laporan keuangan.

Tiga tujuan utama dalam pengukuran kinerja sektor publik, yaitu: (a) dimaksudkan guna membuat kinerja pemerintah menjadi lebih baik, (b) ditujukan bagi penempatan sumber daya dan pengambilan keputusan yang tepat (c) digunakan bagi terwujudnya pertanggung jawaban pada publik serta komunikasi kelembagaan yang lebih baik (Mardiasmo, 2009)

Evaluasi kinerja relevan tidak hanya untuk entitas yang berfokus pada menghasilkan laba, tetapi juga untuk organisasi nirlaba seperti badan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dan memberikan layanan kepada publik melalui penyajian laporan akuntabilitas keuangan. (Sesotyaningtyas, 2012).

Bagi institusi, penilaian kinerja memainkan peran penting. Sebagaimana dinyatakan oleh (Simamora, 2001), keuntungan dari evaluasi kinerja diuraikan sebagai berikut: a. Mendiskripsikan tentang metrik yang dipakai dalam mengevaluasi kinerja manajerial. b. Menjadi panduan untuk mencapai tujuan kinerja yang telah ditentukan. c. Memantau dan menilai kinerja melalui perbandingan rencana kerja dan pelaksanaannya. d. Membantu dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi. e. Memfasilitasi pemahaman proses operasional badan-badan pemerintah. f. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan cara yang tidak memihak.

### **Perbandingan Derajat Desentralisasi**

Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah dikenal dengan Perbandingan derajat desentralisasi. Semakin tinggi derajat desentralisasi ditunjukkan dengan semakin tingginya kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Pendapatan Daerah (Mahmudi, 2019). Dengan melihat perbandingan derajat desentralisasi, dapat terlihat seberapa besar campur tangan pemerintah terhadap

Pembangunan daerah. Dari sini dapat dilihat level kesiapan dari pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah (Purba & Hutabarat, 2017)

### **Perbandingan Kemandirian Keuangan Daerah**

Dengan memeriksa besarnya Perbandingan Kemandirian Keuangan Regional (RKKD), dapat dilihat sejauh mana suatu daerah memiliki kapasitas untuk mendanai kegiatan pemerintah, Pembangunan dan pelayan masyarakat menggunakan pendapatan asli daerah.

Perhitungan Perbandingan Kemandirian Keuangan antar Daerah merupakan perbandingan antara Pendapatan Pribumi Daerah dan Pendapatan Daerah yang berasal dari berbagai sumber, seperti Pendapatan Transfer. Perbandingan ini mencakup faktor-faktor seperti proporsi pendapatan pajak, persentase pendapatan sebagai pengganti pajak atas sumber daya alam, serta dari dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat, dan pinjaman.

(Halim & Kusufi, 2017).

Jika Perbandingan Kemandirian Keuangan Daerah meningkat, ini mengindikasikan penurunan tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan dari pemerintah pusat. Perbandingan Kemandirian Keuangan Daerah juga mencerminkan seberapa besar keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan daerah. Perbandingan Independensi Keuangan Regional yang lebih besar menunjukkan peningkatan keterlibatan warga daerah dalam berkontribusi pada retribusi dan juga pajak. Retribusi serta pajak menjadi bagian penting pada Pendapatan Asli Daerah. Jika masyarakat semakin mampu, maka kemampuan untuk menunaikan pajak akan terjadi kenaikan.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, fokus penting terletak pada interaksi diantara pemerintah pusat dengan daerah (Halim & Kusufi, 2017). Merujuk pada kondisi ini ada beberapa pola hubungan, yaitu:

- a) Sistem jalinan instruktif, terjadi dalam kondisi peran pemerintah pusat melebihi kemampuan dari pemerintah daerah.
- b) Sistem jalinan konsultatif terjadi apabila berkurangnya campur tangan dari pemerintah pusat, hal ini disebabkan kondisi daerah dirasa mampu dalam pelaksanaan otonomi daerah.

- c) Sistem jalinan partisipatif adalah kondisi dimana pemerintah pusat sudah mulai mengalami penurunan peranannya pada pemerintah daerah. Pada masa ini daerah kondisi kemandiriannya hampir mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d) Sistem jalinan delegative, kondisi ini daerah sudah benar-benar mempunyai kemampuan untuk mandiri melaksanakan tugas otonomi daerah.

#### **Perbandingan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD)**

REPAD adalah ukuran Perbandingan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah mengukur potensi pemerintah daerah untuk menggali potensi perolehan PAD terhadap PAD dicanangkan (Mahmudi, 2019). Pengukuran REPAD adalah melalui perbandingan PAD yang benar-benar dicapai terhadap target PAD. Berikut penggolongan Perbandingan Efektivitas sesuai pendapat (Mahsun, 2012) : a) Apabila lebih rendah dari 100% maknanya perbandingan efektifitas pada kondisi tidak efektif. b) Apabila nilai sama target dan realisasi PAD sama dengan, artinya perbandingan efektifitas pada kondisi berimbang. c) Apabila nilainya melebihi 100% ( $x > 100\%$ ) bermakna bahwa perbandingan efektifitas adalah efektif.

#### **Perbandingan Pertumbuhan**

Perbandingan pertumbuhan berfungsi sebagai alat yang berharga dalam menilai apakah pendapatan pemerintah daerah telah mengalami kenaikan atau penurunan dalam satu tahun anggaran atau di beberapa siklus anggaran (Mahmudi, 2019). Metrik ini mengukur kapasitas pemerintah daerah untuk mempertahankan ataupun meningkatkan perolehan pendapatan tingkat yang dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan membedakan tingkat pertumbuhan komponen pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengidentifikasi komponen manakah yang membutuhkan perhatian (Halim & Kusufi, 2017).

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode riset dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229).

#### **Jenis dan Sumber data**

Investigasi ini menggunakan metodologi eksplorasi. Dalam investigasi eksplorasi, tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi hubungan sebab-akibat yang

merupakan akar masalah tertentu. Jika dilihat dari perspektif metodologi penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ditandai dengan fokusnya pada data numerik, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik. Data yang digunakan dalam penyelidikan ini mencakup sumber-sumber seperti data APBD dan PAD.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder, yang mengacu pada data yang tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Sumber dari data yang dipergunakan adalah berasal dari data Anggaran yang disediakan oleh badan pemerintah seperti BPS dan Kementerian Keuangan. Studi ini mencakup periode dari 2019 hingga 2023.

### Metoda Analisis Data

Definisi Konsep dan Opeperbandingannal

a. Perbandingan Derajat Desentralisasi :

$$RDD = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} * 100 \%$$

b. Perbandingan Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD).

Perbandingan Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) berfungsi sebagai indikator sejauh mana kapasitas suatu wilayah secara mandiri membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan layanan bagi masyarakat yang berkontribusi melalui perpajakan dan retribusi sebagai sumber pendapatan utama. Hal ini ditentukan oleh perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari berbagai sumber lain, seperti Pendapatan Transfer, yang meliputi bagi hasil pendapatan pajak, bagian hasil pendapatan bukan pajak, sumber daya alam, dana alokasi umum dan khusus.

$$RKKD = \frac{PAD}{Transfer\ Pusat + Transfer\ Propinsi + Pinjaman} * 100\%$$

c. Perbandingan Efektivitas

Perbandingan efektivitas menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk mengaktualisasikan proyeksi pendapatan asli kabupaten dalam kaitannya dengan target yang ditetapkan ditentukan oleh potensi asli kabupaten. Kategorisasi kapasitas kabupaten sebagai efektif terjadi setelah perbandingan yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100 persen

$$RE = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} * 100$$

d. Perbandingan Pertumbuhan menilai kapasitas pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian mereka di periode mendatang. Ini bagus ketika perbandingan pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan positif atau peningkatan setiap tahun.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{RX_t - RX_{t-1}}{RX_{t-1}} * 100 \%$$

Keterangan:  $RX_t$  = Realisasi Variabel yang diukur tahun t.  $RX_{t-1}$  = Realisasi Variabel yang diukur tahun sebelumnya.

### HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Brebes periode penelitian yang digunakan dari tahun anggaran 2019 sampai dengan 2023. Dalam pengukuran kinerja diukur beberapa analisis ratio. Hasil analisis dapat diketahui secara rinci dalam analisis berikut :

#### Perbandingan Derajat Desentralisasi

Berdasarkan data tentang Pendapatan Asli Daerah di Kota Brebes diperoleh hasil seperti yang ditampilkan pada Tabel 6

Merujuk pada hasil analisis untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Brebes pada periode 2019 sampai dengan 2023 didapat hasil bahwa derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Brebes dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan Kabupaten Brebes pada Pendapatan di luar Pendapatan Asli daerah. Adapun unsur Pendapatan Daerah bagi Kabupaten Brebes sebagian besar masih diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan sebagian dari Transfer antar daerah. Proporsi perolehan dana dari Transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan Transfer antar daerah ini masih pada posisi sekitar 75 % dari Total Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Rendahnya derajat desentralisasi menunjukkan ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa daerah tersebut memiliki kapasitas yang terbatas dalam menghasilkan pendapatan sendiri melalui PAD. Kabupaten Brebes belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari bantuan (transfer) dari pemerintah pusat dalam rangka membiayai kegiatan Pembangunan. Ketergantungan yang tinggi dapat membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam

membuat kebijakan anggaran dan mengimplementasikan program-program pembangunan karena Kabupaten Brebes harus menyesuaikan dengan kondisi dan syarat yang diberlakukan oleh pemberi dana.

#### Perbandingan Kemandirian.

Kemandirian daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pembangunan yang dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh, maka berikut disajikan perbandingan kemandirian di Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil analisis data yang dapat dilihat pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa bahwa perbandingan Kemandirian Keuangan Daerah di Brebes secara umum terjadi kecenderungan kenaikan selama periode lima tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Pada periode ini terjadi kenaikan sebesar 4,37 %. Pada periode ini terjadi penurunan perbandingan kemandirian keuangan daerah hanya terjadi pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena faktor eksternal, yaitu terjadinya wabah Covid di tahun 2019 sampai dengan 2020. Namun setelah 2021 Kabupaten Brebes segera *recovery*, sehingga perbandingan Kemandirian keuangan daerah kembali menaik kenaikan 3,55 % mencapai angka 18,10%. Secara keseluruhan dalam periode penelitian nilai perbandingan kemandirian di Kabupaten Brebes masih dibawah 25 %. Sebagaimana yang disampaikan Halim 2004, maka Kabupaten Brebes masih pada kriteria Instruktif dengan tingkat kemandirian rendah sekali. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari (Harjito et al., 2020) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Brebes perlu menggalakkan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui pajak ataupun retribusi daerah.

#### Perbandingan Efektifitas

Ketika pemerintah daerah melakukan kegiatan Pembangunan, maka ada pentahapan dimana pemerintah daerah melakukan perhitungan target pembiayaan baik yang bersumber dari pemerintah daerah yang bersangkutan, maupun dari pihak luar. Salah satu unsur pembiayaan Pembangunan adalah dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya pemerintah daerah akan membandingkan dengan realisasi atas Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini adalah hasil perhitungan efektifitas PAD di Kabupaten Brebes yang disajikan tertera di Tabel 8.

Dari hasil olah data yang dilakukan yang ditampilkan pada Tabel 8 menunjukkan hasil bahwa efektifitas pengelolaan keuangan di daerah Kabupaten Brebes adalah efektif. Hasil ini ditunjukkan selama periode 2019 sampai 2023 rata – rata perbandingan efektifitas adalah sebesar 103,95 % yang berarti ini melebihi 100%. Pada periode 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi 100%, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes di periode 2019 mampu merealisasi PAD melebihi atas target yang direncanakan. Namun 2020, realisasi penerimaan PAD belum bisa mencapai 100 %. Hasil ini disebabkan pada periode 2020 tertimpa wabah COVID 19. Hal ini mendukung penelitian dari (Putri & Munandar, 2011) yang menyatakan bahwa pandemik Covid berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah.. Pada tahun 2021, merupakan prestasi yang menggembirakan karena realisasi penerimaan PAD melebihi target PAD, bahkan realisasi ini pada posisi yang tertinggi selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023. Namun pada tahun 2022 dan 2023, realisasi PAD di Kabupaten Brebes belum bisa mencapai 100 %. Hal ini disebabkan selama tahun 2022 dan 2023 ada beberapa pos penerimaan pendapatan daerah mengalami penurunan, antara lain pada penurunan retribusi serta pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum efektif dalam pencapaian pendapatan asli sesuai dengan target yang telah dicanangkan. Pemerintah kabupaten Brebes selayaknya lebih mendorong masyarakat untuk lebih mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak. Hasil ini tidak mendukung atas teori yang menyebutkan bahwa semakin besar perbandingan efektifitas menggambarkan semakin baik kemampuan daerah (Halim, 2012). Untuk mendorong PAD, pemerintah Kabupaten Brebes juga perlu menambah potensi sumber Pendapatan Asli daerah yang baru di Kabupaten Brebes antara lain dengan pembukaan tempat wisata baru , pengelolaan retribusi yang lebih baik.

#### Perbandingan Pertumbuhan

Selanjutnya akan dianalisis tentang perbandingan pertumbuhan yang meliputi pertumbuhan Pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah serta perolehan pajak daerah di kabupaten Brebes. Perbandingan perbandingan pertumbuhan ditampilkan pada Tabel 9.

Merujuk Tabel 9 dapat dicermati bahwa pertumbuhan Pendapatan Daerah di Kabupaten Brebes selama periode 2019 sampai dengan 2023 tumbuh rata-rata sebesar 1,63%. Pertumbuhan PAD yang berfluktuatif, dua periode mengalami pertumbuhan

yang negatif. Sementara itu pertumbuhan PAD di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan yang cukup besar di tahun 2021, namun kembali mengalami penurunan yang sangat tajam di tahun 2022, Hal ini perlu menjadi perhatian besar bagi Kabupaten Brebes untuk meningkatkan PAD. Sementara dari unsur penerimaan pajak di Kabupaten Brebes mengalami perkembangan yang bagus, kecuali di tahun 2020 karena terjadinya wabah Covid 19.

### KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil yang disajikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat desentralisasi di kabupaten Brebes masih tergolong rendah. Dari sini nampak bahwa kabupaten Brebes sangat bergantung terhadap subsidi yang berasal dari pemerintah pusat untuk mendukung upaya pembangunannya. Adapun tingkat otonomi daerah, kabupaten Brebes masih termasuk dalam kategori Pengawas, menandakan ketidakmampuannya saat ini untuk mencapai swasembada. Hasil analisis untuk efektifitas PAD, menunjukkan bahwa realisasi PAD masih pada kategori efektif yang artinya realisasi pencapaian PAD sering tidak tercapai 100%. Untuk perbandingan pertumbuhan diperoleh hasil bahwa pertumbuhan Pendapatan daerah di Kabupaten Brebes masih sangat rendah, pertumbuhan PAD cenderung mengalami penurunan dan pertumbuhan pajak cenderung terjadi peningkatan.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa masih rendahnya derajat desentralisasi fiskal dan derajat kemandirian di Kabupaten Brebes. Dari hasil ini, maka perlu bagi pemerintah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan upaya dalam menggali potensi pendapatan asli daerah. Untuk mencapainya dapat dilaksanakan dengan melakukan penggalan sumber pendapatan daerah dengan lebih intensif ataupun penemuan sumber pendapatan daerah yang baru.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H., & Ekaristi, P. D. (2009). Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–19.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2017). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Harjito, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14061>

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm. *Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.
- Khusaini, M. (2019). *Ekonomi publik: Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah*. Universitas Brawijaya.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Keuangan Pemerintah daerah*. STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFPE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(1), 11–20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- Noviriani, E., & Febrianty, A. D. (2017). Determinan Penerimaan dan Belanja Daerah: Studi pada 10 Provinsi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(1), 57–77. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.14>
- Purba, S., & Hutabarat, R. C. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Pada Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 1.
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Among Makarti*, 14(2). <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.213>
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2011). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Manajemen Ekonomi Akuntansi*, 5(3).
- Putry, N. A. C., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Opini Audit dan Kesejahteraan Masyarakat di daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 12(1).
- Saraswat, D., & Rion, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah daerah, Leverage, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2). <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/462>
- Septa Soraida. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum Dan Selama Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 78–82. <https://doi.org/10.56127/jekma.v1i2.154>
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leveragr, Ukuran Legeslative, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1(1). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/%20article/view/711>
- Simamora, H. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (2nd ed.). STIE YKPN.
- Siregar, S. A. H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perumbuhan Ekonomi 2003-2021. *Journal of Development Economic and Sosial Studies*, 2(1).
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(1), 97–112. <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i1.61>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

**TABEL**

Tabel 1. Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Daerah	3.096,83 M	3.008,37 M	3.162,14 M	2.989,82 M
PAD	397,09 M	392,54 M	518,51 M	419,40 M
TKDD	1.906,34 M	2.200,76 M	2.238,34 M	2.304,33 M
Pendapatan Lainnya	779,99 M	415,07 M	405,29 M	266,09 M

Sumber : djpk.kemenkeu

Tabel 2. Kriteria Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi (%)	Keterangan
0,000 sampai dengan 10,000	Sangat Rendah
10,010 sampai dengan 20,000	Rendah
20,010 sampai dengan 40,00 0	Cukup
40,010 sampai dengan 50,01	Tinggi
Lebih dari 50 %	Sangat Tinggi

Tabel 3. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Daerah (%)	Keuangan	Pola Hubungan	Keterangan
0 sampai dengan 25		Instruktif	Rendah Sekali
25 sampai dengan 50		Konsultatif	Rendah
50 sampai dengan 75		Partisipatif	Sedang
75 sampai dengan 100		Delegatif	Tinggi

Sumber : Halim, 2004

Tabel 4. Kriteria Perbandingan Efektifitas

Efektifitas	Keterangan (%)
Sangat efektif	Lebih dari 100
Efektif	100
Cukup Efektif	Antara 75 sampai 89
Tidak Efektif	Kurang dari 75

Tabel 5. Kriteria Perbandingan Pertumbuhan

Pertumbuhan (%)	Keterangan
0 sampai dengan 25	Rendah
25 sampai dengan 50	Sedang
50 sampai dengan 100	Tinggi

Tabel 6. Perbandingan Derajat Desentralisasi Kabupaten Brebes 2019 - 2023

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	RKD	Keterangan
2019	379,09	3.096,83	12,24 %	Rendah
2020	392,54	3.008,37	13,04 %	Rendah
2021	518,51	3.162,14	16,39 %	Rendah
2022	419,40	2.989,82	14,02 %	Rendah
2023	479,94	3.075,01	15,60%	Rendah
Rata-rata			14,26 %	

Sumber : djpkkemenkeu,diolah

Tabel 7. Perbandingan Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Transer Pusat + Transfer Propinsi + Pinjaman	RKD	Keterangan
2019	379,09	5306,36	13,73 %	Instruktif
2020	392,54	5008,22	15,17 %	Instruktif
2021	518,51	5094,42	19,65 %	Instruktif
2022	419,40	5300,17	15,29 %	Instruktif
2023	479,94	5231,84	18,10 %	Instruktif
Rata-rata			16,39%	

Sumber : djppkemenkeu, diolah

Tabel 8. Perbandingan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Brebes 2019-2023

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Perbandingan Efektifitas	Keterangan
2019	379,09	372,17	101,85 %	Sangat Efektif
2020	392,54	398,65	98,46 %	Efektif
2021	518,51	413,15	125,50 %	Sangat Efektif
2022	419,4	434,99	96,41 %	Efektif
2023	479,94	492,05	97,53 %	Efektif

Sumber : djppkemenkeu, diolah

Tabel 9. Perbandingan Pertumbuhan PAD, Pendapatan Daerah

Tahun	Pertumbuhan Pendapatan daerah(%)	Pertumbuhan PAD (%)	Pertumbuhan Penerimaan pajak (%)
2019	8,51	9,27	17,71
2020	-2,86	3,54	-3,61
2021	5,11	32,09	14,56
2022	-5,45	-19,11	20,80
2023	2,85	0,14	19,52

Sumber : djppkemenkeu, diolah